

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

Sertifikat Tanah dan Deklarasi Kota Lengkap Beri Kepastian Hukum Aset

Ada kado ulang tahun ke-496 Jakarta yang membahagiakan Pemprov DKI. Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto menyerahkan 1.086 sertifikat kepada Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota Jakarta pada 26 Juni 2023.

Pj. Gubernur Heru mengapresiasi Kementerian ATR/BPN yang telah bersinergi dengan Pemprov DKI dalam pengamanan aset secara hukum melalui Penandatanganan Nota Kesepakatan pada 19 Mei 2023 lalu.

"Apresiasi kepada Bapak Menteri beserta jajaran Kementerian ATR/BPN dan Kanwil BPN DKI Jakarta, karena masih dalam suasana HUT ke-496 Kota Jakarta, kami diberi hadiah. Hadiahnya adalah pengamanan sertifikat. Sekali lagi, terima kasih atas kerja sama, dukungan, serta bantuan dari Bapak Menteri beserta jajaran dalam pencegahan dan penanganan permasalahan kasus pertanahan, sekaligus menyerahkan sertifikat aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," katanya.

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono juga mengungkapkan, dengan penyerahan sertifikat tersebut, aset tanah milik Pemprov DKI Jakarta akan terjaga secara baik. Berkat ada kepastian hukum itu, kasus-kasus penyelewengan tanah dapat diminimalkan pula. "Tentunya kita menjaga aset Pemprov DKI Jakarta dan ke depan akan semakin efisien, sehingga harapannya tidak ada lagi penyalahgunaan aset. Dan kita akan merasa aman, karena aset itu sudah bersertifikat," ujarnya.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengakui, saat ini masih terdapat berbagai persoalan tanah, di antaranya kasus yang melibat-

kan mafia tanah. Karena itu, pihaknya akan terus berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah serta institusi hukum, untuk mencari solusi yang terbaik. "Saya mengapresiasi Pj. Gubernur Heru, karena berkat sinergi dan kolaborasi ini dapat terwujud penyerahan 1.086 aset milik Pemprov DKI Jakarta," ucapnya.

Sedangkan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Wartomo menjelaskan, target sertifikat aset tahun ini sekitar 4.000 sertifikat. Karena itu, sinergi dan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dengan Pemprov DKI terus dilakukan. Sebelumnya, pada Mei 2023 lalu, Kementerian ATR/BPN juga telah memberikan 162 sertifikat aset kepada Pemprov DKI Jakarta.

"Sampai akhir 2023 ini, targetnya ada 4.000 sertifikat. Sinergi dengan Pemprov DKI terus kami lakukan dan tingkatkan, terutama dalam membahas permasalahan yang ada dalam pengamanan aset ini," tuturnya.

Kota Lengkap

Bukan hanya menyerahkan sertifikat aset, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto juga mendeklarasikan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Jakarta Barat sebagai Kota Lengkap di tempat serentak waktu yang sama. Ia mengutarakan, sebuah

kota disebut lengkap jika setiap kelurahannya memiliki data peta bidang yang sudah terdaftar seluruhnya.

"Ini sangat penting, karena penyelesaian surat-surat itu pun dimulai dari tingkat kelurahan. Sehingga, apabila ada permasalahan atau perubahan pada peta bidang, lurah dapat mengecek kesesuaian atau dapat di-overlay antara peta bidang dengan peta pajak. Harapannya pun permasalahan dapat selesai di tingkat kelurahan," papar Hadi.

Karena sudah ada kepastian hukum terkait aset di kelurahan, Hadi berharap, status Kota Lengkap dapat mendorong investor untuk berinvestasi di kelurahan tersebut. Pj. Gubernur Heru menyambutnya pula, "Deklarasi Kota Lengkap untuk Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan bentuk pemberian kepastian hukum bagi masyarakat atas bidang tanah yang telah terpetakan serta terdaftar secara akurat."

Heru berpesan, agar Kota Administrasi Jakarta Timur dan Jakarta Selatan dapat segera menyusul sebagai Kota Lengkap. Pada Mei lalu,

Kementerian ATR/BPN pun sudah mendeklarasikan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota Lengkap. Sinergi antara Kementerian ATR/BPN dengan Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan Kota Lengkap diharapkan dapat menunjang transformasi Jakarta menjadi Kota Global. Dengan demikian, Pemprov DKI bisa mengelola seluruh asetnya dengan baik, demi menjamin kepastian hukum kepada semua warga, termasuk investor, dalam menunjang perekonomian Jakarta.

Sukses Jakarta untuk Indonesia.